

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPKA) KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

Disajikan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh

DEDI YUANTO

NIM. 15262

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FALKUTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2013

PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPKA) KOTA PADANG

Nama : Dedi Yuanto
NIM :15262
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, 27 Juni 2013

Diketahui Oleh:


Ketua Prodi


Perengki Susanto SE,M.Sc

NIP. 19810404 200501 1002

Disetujui Oleh:

Pembimbing


Nurzi Sebrina SE,M.Sc.Ak

NIP. 19720910 199802 2003

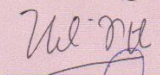
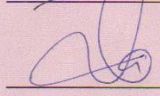
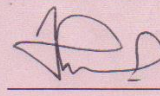
PENGESAHAN TUGAS AKHIR
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPKA) KOTA PADANG

Nama : Dedi Yuanto
NIM : 15262
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 25 Juli 2013

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Nelvirita,SE,M.Si,Ak	(Ketua) 
2. Deviani,SE,M.Si,AK	(Anggota) 
3. Henri Agustin,SE,M.Sc,AK	(Anggota) 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Yuanto

Thn. Masuk/NIM : 2009/15262

Tempat/Tanggal Lahir : Pasaman Barat/25 Juli 1989

Program Studi : Akuntansi (DIII)

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Pasaman Barat

Judul Tugas Akhir : Analisis Perlakuan Aktiva Tetap Pada Dinas
Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai.

Padang, Januari 2013

Yang menyatakan,



Dedi Yuanto

NIM. 15262

ABSTRAK

Yuanto, Dedi : Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang dengan menganalisa apakah perlakuan aktiva tetap tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penelitian ini menggunakan pendekatan praktik lapangan, wawancara, serta melakukan observasi. Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan penelitian langsung pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang.

Berdasarkan pengolahan data dapat diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sudah dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ini ditandai dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Padang dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan masih ada yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), diantaranya pengukuran dan penilaian aktiva tetap, dimana dalam pengukuran aktiva tetap Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang belum melakukan penyusutan (depresiasi) terhadap aktiva tetapnya, melainkan menggunakan sistim penilaian kembali, padahal dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) penilaian kembali itu tidak diperkenankan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk mengetahui nilai wajar suatu aktiva tetap itu adalah biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dan dalam menilai aktiva tetap Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang hanya melakukan penilaian aktiva tetap yang belum mempunyai nilai perolehan sedangkan menurut standar akuntansi pemerintah (SAP) penilaian aktiva tetap dilakukan setiap akhir tahun agar aktiva tetap tersebut mencerminkan nilai wajar sekarang.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini. Sebagai judul tugas akhir yaitu "Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Padang.

Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk memperoleh gelar Diploma III Akuntansi di Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan latihan, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dan Ayah yang selalu memberikan penulis dukungan penuh dalam kegiatan perkuliahan dan bantuan lainnya yang tidak pernah terhitung.
2. Ibuk Nurzi Sebrina SE,M.Sc.Ak selaku Dosen Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Semua dosen yang telah memberi peneliti ilmu di perguruan tinggi.
4. Kakak saya Ratna Wilis yang selalu memberikan semangat dari pertama kuliah sampai saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Rekan-rekan Sesama Mahasiswa dan rekan-rekan yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal shaleh bagi bapak dan ibu serta mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan baik penganalisisan dan pembahasan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan laporan ini, sehingga suatu saat nanti akan bermanfaat bagi pembaca lainnya, terutama bagi penulis sendiri.

Padang, September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Aktiva Tetap.....	8
B. Jenis-Jenis Aktiva Tetap	9
C. Komponen Biaya Aktiva Tetap.....	11
D. Perolehan Dan Pencatatan Aktiva Tetap.....	13
E. Pengeluaran setelah perolehan.....	15
F. Penyusutan Aktifa tetap	16
G. Penghentian dan Pelepasan	20
H. Perlakuan Akutansi Aktifa Tetap.....	21
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Rancangan Penelitian.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang	34
1. Profil Instansi.....	34
2. Visi Dan Misi.....	34
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang	35
B. Hasil Penelitian	43
1. Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang	43
2. Apakah Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang Telah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
C. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Daftar Rekapitulasi Aktiva Tetap	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Permohonan Observasi
2. Neraca
3. Rekapitulasi Daftar mutasi Aktiva Tetap Tahun Anggaran 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas suatu perusahaan atau instansi akan dapat berjalan dengan lancar apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap perusahaan atau instansi akan berusaha beraktivitas semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan efisien dan efektif.

Aktiva tetap merupakan salah satu sumber daya yang dapat digunakan oleh suatu instansi pemerintah daerah tersebut dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintah daerah sektor penunjang dalam pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan aktiva tetap daerah jika sebelumnya tersentralisasi di biro atau bagian perlengkapan daerah, maka saat ini pengelolaan aktiva tetap tersebut disentralisasikan ke masing-masing satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) merupakan suatu Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan dan aset yang ada didaerah tersebut. Dalam menunjang kegiatan operasional sehari-hari, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga tanpa sarana dan prasarana yang ada dimiliki tidak mungkin dalam pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

(DPKA) tersebut dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu Merupakan suatu keharusan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) untuk menanamkan investasi dalam bentuk aktiva tetap yang merupakan perwujudan dari penyediaan prasarana penunjang bagi aktivitas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aktiva Tetap dijelaskan bahwa Aktiva tetap yang dimiliki pemerintah antara lain berupa tanah, gedung atau bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, aktiva tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan aktiva tetap milik daerah agar aktiva tetap yang dimiliki dapat dikelola secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 (PSAP07) dari lampiran PP24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, serta pengungkapan aktiva tetap berdasarkan peristiwa (Events) yang terjadi seperti pemeliharaan, perolehan, pertukaran dan penyusutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara atau Daerah menyatakan bahwa, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna barang milik daerah,

berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Serta membuat laporan atas pencatatan dan investasi barang milik daerah tersebut yang berguna untuk menyusun laporan keuangan yang akan digunakan sebagai pusat penanggung jawaban atas kinerja yang dilakukan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah 07, Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk memperoleh aktiva tetap yang dibutuhkan banyak cara yang ditempuh antara lain dengan pembelian tunai, dibangun sendiri, ditukar dengan aktiva lain atau surat berharga, hadiah atau sumbangan dari donasi atau pemerintah dan banyak lagi cara lain untuk mendapatkannya. Dalam hal ini pencatatan akuntansi yang tepat yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan sifat dan cara mendapatkan aktiva tetap tersebut.

Pencatatan akuntansi yang diperlukan terhadap aktiva tetap antara lain pada saat perolehan, saat digunakan dalam operasi instansi pemerintahan, sampai dengan saat aktiva tetap tersebut dijual atau tidak digunakan lagi dalam kegiatan instansi pemerintahan.

Aktiva tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional instansi pemerintahan semakin lama kemampuan aktiva tersebut akan berkurang dan mengalami penurunan nilai manfaat sejalan berlalunya waktu atau disebut juga

dengan istilah penyusutan, tetapi tidak demikian halnya dengan tanah, karena tanah mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas dan tidak dapat disusutkan. Berkurangnya kemampuan aktiva tetap tersebut juga dapat disebabkan karena keterbelakangan teknologi, hal ini berarti berkurang pula nilai aktiva yang bersangkutan. Pengakuan adanya penurunan nilai manfaat terhadap aktiva tetap ini perlu dicatat dan dilaporkan dalam suatu penyusutan.

Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari pengguna aktiva tetap yang dimiliki dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan menyajikan aktiva tetap yang dimiliki secara wajar dalam laporan keuangan.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dikota Padang maka untuk menunjang kegiatan pemberian layanan kepada masyarakat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang banyak terdapat jenis aktiva tetap yang dimiliki dan dibutuhkannya tambahan aktiva tetap. Tetapi dalam Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang masih kurangnya perhatian dalam pengelolaan, pencatatan dan pembukuan aktiva tetap secara semestinya sehingga banyak nilai aktiva tetap tersebut yang tidak diketahui nilai perolehan tiap-tiap aktivanya, tetapi hanya mengetahui nilai perolehan secara keseluruhannya. Berhubungan aktiva tetap tersebut sangat berpengaruh dalam menunjang kinerja entitas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melakukan tugas-tugasnya. Apabila dalam melakukan pembukuan dan pencatatan aktiva yang kurang baik maka akan terdapat kesalahan-kesalahan pada akuntansi aktiva tetap

tersebut, baik karena nilainya, keanekaragamannya maupun cara perolehan aktiva tetap itu sendiri. Maka perlakuan atas akun-akun ini sangat penting dilakukan, karena jika terjadi kesalahan dalam penentuan jumlahnya akan mengakibatkan kesalahan dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang

Pengelolaan aktiva tetap yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sangat penting karena dapat menunjang kinerja entitas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari penggunaan aktiva tetap yang dimiliki dalam rangka pelayanannya terhadap masyarakat dan menyajikan aktiva tetap yang dimiliki secara wajar dalam laporan keuangan.

Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian perlakuan akuntansi aktiva tetap yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka penulis memfokuskan penelitian pada masalah perlakuan aktiva tetap tersebut. Berdasarkan alasan diatas maka penulis dapat mengambil data-data yang kongkrit dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itulah penulis memilih Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) kota Padang sebagai objek penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan

Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang yang disajikan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang”**

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan ini akan dikemukakan pemecahan yang erat hubungannya dengan aktiva tetap yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang.
2. Apakah penerapannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aktiva tetapnya sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana berlatih untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian serta mendalami bidang studi yang penulis pilih, terutama yang berhubungan dengan akuntansi aktiva tetap.

2. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang khususnya gambaran mengenai masalah yang dihadapi sehubungan dengan aktiva tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan serta pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam Bab sebelumnya, yaitu tentang perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang belum berjalan dengan semestinya ini ditandai masih banyak aktiva tetap yang tidak diketahui nilai perolehannya, sehingga dalam pelaksanaannya Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang melakukan penilaian kembali pada aktiva tetapnya yang belum mempunyai nilai perolehan.
2. Penerapan perlakuan akuntansi aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang sudah dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang belum sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintah karena Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang belum melakukan penyusutan terhadap aktiva tetap, tetapi melakukan

penilaian kembali terhadap aktiva tetap sementara dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) penilaian kembali itu tidak diperkenankan.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas kebijakan mengenai perlakuan terhadap aktiva tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya dapat berguna bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang dalam melakukan tugasnya lebih lanjut.

Adapun saran yang penulis berikan adalah:

1. Sebaiknya Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang lebih meningkatkan lagi kualitas dalam pengelolaan aktiva tetap sehingga aktiva tetap tersebut tetap terjaga dengan baik dan menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sehingga pengeluaran biaya dapat diminimumkan sekecil mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Al Haryono Yusuf. 2002. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Edisi 6, Yogyakarta
: Universitas Gajah Mada

Departemen Keuangan R.I., Komite standar akuntansi pemerintah pusat
dan daerah, draft Publikasian Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.1-3,
Jakarta, 2002;

Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010, *Buletin Teknis Standar
Akuntansi Pemerintahan Nomor 09. Akuntansi Aset Tetap*, Jakarta

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke 3, Jakarta

Nazir, Moh. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Peraturan Walikota Padang, *Kebijakan Akuntansi Pemerintah*, Nomor 47
Padang, 2010;

Sugiyono. (2006). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfa Beta

Tim Fakultas Ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi. (2012).
Pedoman Penulisan Tugas Akhir. Padang: FE-UNP